

SEKURITISASI ISU KEAMANAN MARITIM DALAM MENDUKUNG DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DI ADMM PLUS ON MARITIME SECURITY

SECURITIZATION OF MARITIME SECURITY ISSUES IN SUPPORTING INDONESIA'S DEFENSE DIPLOMACY AT ADMM-PLUS ON MARITIME SECURITY

Rizky Reza Lubis ¹

Alumni Universitas Pertahanan Indonesia
(rizkyrezalubis@gmail.com)

Abstrak – Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak persoalan keamanan maritim yang perlu dikelola secara tepat melalui pendekatan diplomasi pertahanan, termasuk dalam kerangka ASEAN. *ADMM Plus on Maritime Security* sebagai forum dan dialog pertahanan tertinggi di ASEAN yang membicarakan persoalan keamanan maritim diharapkan dapat membangun rasa saling percaya antar-negara ASEAN dan negara luar ASEAN dalam mengatasi persoalan maritim. Namun, beberapa tujuan yang ingin dicapai belum tercapai dengan baik dikarenakan banyaknya persoalan keamanan maritim yang bersifat kompleks pada lingkup domestik. Tulisan ini akan menggunakan teori sekuritisasi, konsep diplomasi pertahanan, dan konsep keamanan maritim untuk menganalisis persoalan keamanan maritim di Indonesia yang perlu disekuritisasi untuk mendukung diplomasi pertahanan Indonesia di *ADMM-Plus on Maritime Security*. Namun, tahap sekuritisasi tersebut menghadapi beberapa tantangan dari berbagai aspek, terutama kebiasaan pemimpin politik yang cenderung menggunakan isu keamanan maritim hanya sebagai instrumen politik sehingga mengabaikan isu keamanan maritim yang merupakan ancaman bagi negara.

Kata Kunci : keamanan maritim, sekuritisasi, ADMM-Plus, diplomasi pertahanan

Abstract – Indonesia is one of the countries which has many maritime security issues that needs to be managed appropriately through defense diplomacy approach, including the ASEAN framework. *ADMM Plus on Maritime Security* as the highest defense forum and dialog in ASEAN on maritime security issues is expected to be able to build confidence building measures and mutual trust between ASEAN member states and non member states in solving maritim security issues. However, some goal have not been achieved due to many complex problems on maritime security in domestic sphere. This paper will use securitization theory, defense diplomacy concept, and maritime security concept for analysing the maritime security issues in Indonesia which need securitization for supporting its defense diplomacy at *ADMM Plus on Maritime Security*. However, the securitization progress faced several challenges coming from various aspects, especially the habit of political leaders that only use maritime security as political instrument without concerning to the real security issues.

Keywords: maritime security, securitization, ADMM-Plus, defense diplomacy

¹ Alumnus Universitas Pertahanan Indonesia, Program Studi Diplomasi Pertahanan Cohort 2.

Pendahuluan

Laut di Kawasan Asia Tenggara merupakan jalur perdagangan maritim tersibuk di dunia. Hal tersebut mendorong nilai penting pada aspek politik dan keamanannya. Pentingnya laut di Kawasan Asia Tenggara tidak hanya dirasakan bagi negara-negara di kawasan tersebut tetapi juga bagi negara-negara luar kawasan, baik sebagai perlintasan kapal niaga maupun sebagai bagian dari strategi geopolitik. Konsekuensi dari pentingnya laut tersebut adalah memunculkan kriminal-kriminal transnasional dan beberapa kelompok teroris yang menjadikan laut di Kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah operasi kejahatan maritim.²

Ancaman keamanan maritim tersebut tidak hanya berdampak pada negaratertentu, namun jugamenimbulkan ancaman terhadap keamanan regional dan global dengan potensi paling besar menghambat perdagangan internasional. *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* mencatat jenis-jenis kejahatan lintas negara yang kerap terjadi di Kawasan Asia Tenggara, yang beberapa diantaranya terjadi dalam dimensi maritim, yaitu: perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, pembajakan, penyelundupan senjata dan terorisme maritim.³ Ancaman keamanan

² Jakarta International Defense Dialog (JIDD), “Strategic Assessment Building Maritime Collaboration for Security and Stability”, (Jakarta: JIDD, 2014).

³ Terorisme maritim mengacu pada istilah yang dikeluarkan *The Council for Security Cooperation in the Asia Pacific*, bahwa terorisme maritim merupakan aktivitas terror yang dilakukan di

maritim tersebut merupakan ancaman non-tradisional yang membahayakan bagi kawasan dan tidak dapat ditangani oleh satu negara mengingat wilayah operasi kejahatan tersebut bersifat lintas negara.⁴

Perlu dipahami bahwa ancaman keamanan maritim tersebut juga berpotensi melebar menjadi permasalahan di tingkat global. Merujuk pada kasus yang dicontohkan Stig Jarle Hansen mengenai kasus pembajakan di Somalia, dimulai dari aksi nelayan-nelayan yang melakukan pembajakan terhadap kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing* di teritori mereka hingga melebar ke aksi pembajakan terhadap kapal-kapal perniagaan besar.⁵ Jika pembajakan dilakukan pada kapal kargo yang bernilai ekonomi tinggi maka akan sangat mempengaruhi roda perekonomian global. Hal ini sangat memungkinkan terjadi di kawasan Asia Tenggara, terutama di jalur perdagangan tersibuk seperti Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dalam mengatasi ancaman keamanan maritim yang bersifat lintas

lingkungan maritim, baik dengan menggunakan media maritim (seperti kapal) maupun menyerang objek maritim dengan memberikan dampak teror, seperti kapal, pelabuhan, personil/awak, daerah pesisir dan sebagainya. Center of International Maritime Security, “The ISPS-Code and Maritime Terrorism”, dalam <http://cimsec.org/isps-code-maritime-terrorism/12098>, 15 Juli 2014, diakses pada 5 Februari 2018.

⁴ ASEAN, “ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime”, dalam http://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Plan-of-Action-in-Combating-TC_Adopted-by-11th-AMMTC-on-20Sept17.pdf, 20 September 2017, diakses pada 5 Februari 2018.

⁵ Stig Jarle Hansen, “Private security & local politics in Somalia”, *Review of African Political Economy*, Vol.35 No.118, Desember 2014, hlm. 585-598.

negara tersebut, penanganan oleh satu negara tidaklah memungkinkan karena berkaitan dengan kedaulatan teritorial negara lain, selain itu kapabilitas negara-negara Asia Tenggara cenderung masih lemah untuk mengatasinya sendiri.⁶ Adapun upaya paling efektif bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah melakukan kerjasama internasional antar-negara anggota ASEAN dan negara-negara dari luar ASEAN yang memiliki kepentingan diperaian wilayah Asia Tenggara dalam mengatasi ancaman tersebut. Namun, dalam mengatasinya secara bersama, negara-negara ASEAN memiliki tantangan yang cukup mendasar, seperti perbedaan kepentingan dan doktrin maritim antar-negara ASEAN yang berpotensi menimbulkan sengketa dan konflik intra-regional.⁷ Belum lagi ketika harus dihadapkan dengan negara-negara *great powers* dari luar kawasan yang cenderung mendominasi. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikannya membutuhkan mekanisme kerja sama yang jelas, bermuatan *Confidence Building Measures* (CBM)/ rasa saling percaya untuk menghindari konflik antar-negara dan tidak melanggar prinsip non-intervensi ASEAN didalam ASEAN Way.⁸

⁶ Rodon Pedrason, "Defense Diplomacy Introduction", Mata Kuliah Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, 9 Mei 2016.

⁷ David Carpie, "Structures, Shocks and Norm Change: Explaining The Late Rise of Asia's Defence Diplomacy", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol.31, No.1, April 2013, hlm. 1-26.

⁸ ASEAN Way merujuk pada prinsip-prinsip dasar ASEAN, yang terdiri dari; (1) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara; (2) Hak setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan,

Indonesia dengan wilayah laut dua per tiga Asia Tenggara, sekaligus sebagai negara kepulauan terbesar, dan sebagai "*natural leader*" ASEAN⁹, memiliki kepentingan dan kemampuan menjadi inisiator dalam membawa persoalan keamanan maritim di tingkat ASEAN dan menggalang mekanisme kerja sama maritim yang efektif antar-negara ASEAN serta mengakomodir kepentingan negara non-kawasan tanpa merugikan kawasan itu sendiri. Salah satu hal yang paling relevan dapat dilakukan adalah memaksimalkan media diplomasi pertahanan tingkat ASEAN agar tidak melanggar prinsip non-intervensi ASEAN dan bermuatan CBM. Adapun bentuk kerjasama ASEAN yang paling tinggi dalam sektor pertahanan dan keamanan serta relevan dengan syarat tersebut adalah ASEAN *Defense Ministers' Meeting* (ADMM) dan ADMM-Plus yang melibatkan negara mitra ASEAN.

ADMM-Plus on Maritime Security

Pada dasarnya, ADMM merupakan mitra wacana dan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan yang dibentuk pada tahun 2006 dan telah berhasil membentuk inisiasi kerjasama pertahanan dan kemananan di Asia Tenggara dan

subversif atau koersi pihak luar; (3) Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota (4) Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai; (5) Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan; (6) Kerja sama efektif; ASEAN Secretariat, "The ASEAN Charter", (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008).

⁹ Rodon Pedrason, *ASEAN's Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community*, (Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2015).

membentuk CBM antar-negara anggota ASEAN. Pada saat itulah terminologi dan konsep baru “kerjasama pertahanan” diperkenalkan di ASEAN, yaitu diplomasi pertahanan.¹⁰ADMM telah menyepakati enam bentuk kerjasama teknis, termasuk dalam kerja sama keamanan maritim. Untuk bidang keamanan maritim yang lebih spesifik, terdapat pada kerangka kerjasama teknis ADMM-Plus.¹¹

ADMM-plus sendiri dibentuk pada tahun 2010 yang merupakan produk mekanisme konsultasi serta kerjasama dalam kerangka ADMM yang menunjukkan strategi *outward looking* ASEAN dalam hubungan eksternalnya, yaitu melibatkan negara-negara non-ASEAN atau *external powers* yang disebut dengan “negara Plus”. Adapun negara Plus yang dimaksud merupakan negara mitra strategis ASEAN yaitu Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat (AS).¹²

ADMM-Plus bergerak dengan mekanisme yang berbeda dengan ADMM, dimana ADMM-Plus menyetujui untuk bekerjasama dalam enam bentuk kerjasama praktis (*Expert Working Group/EWG*), yaitu *Counter-terrorism, Humanitarian Assistance, Disaster Management, Peacekeeping Operations and Military Medicine, Cyber Security, dan Maritime Security*.¹³ Salah satu bentuk teknis yang menjadi fokus

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ ADMM, “About the ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM)”, dalam <https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm-plus.html>, 14 Januari 2014, diakses pada 20 Januari 2018.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

permasalahan adalah *ADMM-Plus on Maritime Security*¹⁴ yang berbicara pada isu-isu keamanan maritim. Hingga saat ini, *ADMM-Plus on Maritime Security* telah melakukan beberapa kali pertemuan yang menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam kerjasama keamanan dan pertahanan dalam sektor keamanan maritim. Seperti *Table-Top Exercise* (TTX) dan *Field Training Exercise* (FTX). Selain itu, dialog dan transparansi yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan tersebut dipercaya telah berhasil mempromosikan rasa saling percaya atau CBM antar-negara anggota.¹⁵

Adapun kegiatan-kegiatan *ADMM-Plus on Maritime Security* secara spesifik berfokus pada *capacity building* instrumen maritim negara, *sharing information* terkait kejahatan maritim di kawasan, serta meningkatkan stabilitas dan perdamaian kawasan melalui kerjasama keamanan maritim. *ADMM-Plus on Maritime Security* juga berkontribusi dalam mewujudkan *ASEAN Security Community* dan menjadi fasilitator dalam Program Aksi Vientiane, yaitu program yang bertujuan untuk membangun ASEAN yang aman, damai dan sejahtera.¹⁶ Tujuan dan fungsi *ADMM-Plus on Maritime Security* tersebut sesuai dengan konsep diplomasi pertahanan

¹⁴ *ADMM-Plus on Maritime Security* merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk segala bentuk kegiatan ADMM-Plus yang berdimensi keamanan maritim. Baik dalam tataran forum/dialog hingga tataran kerja sama praktis.

¹⁵ Jakarta International Defense Dialog (JIDD), “Strategic Assessment Building Maritime Collaboration for Security and Stability”, (Jakarta: JIDD, 2014).

¹⁶ Davies Matthew, “Explaining The Vientiane Action Programme: Asean And The Institutionalisation Of Human Rights”, *The Pacific Review*, Vol. 26. No. 4, September 2013, hlm.385-406.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Insiden Laut di Asia Tenggara Tahun 2011-2015

Location	ACTUAL ATTACKS		ATTEMPTED ATTACKS	
	Boarded	Hijacked	Fired Upon	Attempted
S E ASIA				
Indonesia	94	3		11
Malacca Straits	1	4		
Malaysia	6	6		1
Philippines	8		1	2
Singapore Straits	8			1
Thailand	1			

Sumber: IMB, "Piracy and Armed Robbery Against Ships-2015 Annual Report" (Januari–Desember 2015), (London: ICC-IMB, 2015), hlm. 5.

khususnya dalam penciptaan CBM dan *mutual trust*. Konsep diplomasi pertahanan dapat dipahami dari definisi Rodon Pedrason:¹⁷

"all methods and strategies used by countries that may be in a state of competition with one another, but they have used a certain kind of practice including economic, culture, political cooperation, defence cooperation and diplomacy to make friends, hopefully cooperate with one another, and, most importantly, to build and increase mutual trust".

Berdasarkan definisi tersebut, *ADMM-Plus on Maritime Security* yang merupakan mitra wicara antar-menteri pertahanan dan menghasilkan kerangka kerja sama pertahanan dalam sektor keamanan maritim dapat dikatakan sebagai media diplomasi pertahanan ASEAN yang berfokus pada dimensi keamanan maritim.¹⁸

Kepentingan Indonesia dalam ADMM-Plus on Maritime Security

Jika dilihat dalam tujuan ideal tersebut,

¹⁷ Rodon Pedrason, "Defense Diplomacy Introduction", Mata Kuliah Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, 9 Mei 2016.

¹⁸ Rizky Reza Lubis, "Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mereduksi Rivalitas Great Powers di Laut Cina Selatan", Tesis, (Sentul: Universitas Pertahanan Indonesia, 2017).

seharusnya *ADMM-Plus on Maritime Security* mampu menjadi fasilitas utama bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi permasalahan keamanan maritim. Faktanya, masih banyak persoalan keamanan maritim di Kawasan Asia Tenggara yang dihadapi, dimulai dari kejahatan maritim yang telah disebutkan sebelumnya hingga ancaman tradisional seperti sengketa perbatasan maritim baik sengketa bilateral maupun multilateral seperti sengketa Laut Cina Selatanyang melibatkan tindakan Tiongkok yang lebih asertif. Sementara itu, ancaman keamanan maritim di Asia Tenggara pada beberapa tahun terakhir juga kerap mengalami peningkatan dan banyak terlihat dalam bentuk pembajakan, penyelundupan, *illegal fishing* dan pencemaran laut melalui limbah. Hal tersebut menjadi faktor-faktor penyebab utama insiden laut di Asia Tenggara.¹⁹

Tabel 1. menunjukkan tiap tahun relatif terjadi peningkatan insiden di laut kawasan Asia Tenggara. Namun, peningkatan tersebut tidak simetris dengan kemampuan negara-negara

¹⁹ See Seng Tan, "Providers not protectors: institutionalizing responsible sovereignty in Southeast Asia", *Asian Security Journal*, Vol. 7, No. 13, September 2011, hlm. 201-217.

di Kawasan Asia Tenggara dalam menghadapinya. Secara sederhana, masih lemahnya pengawasan maritim akan berdampak pada peningkatan ancaman terhadap maritim dan dapat memicu konflik intra-regional di tataran regional.²⁰ Tabel 1. juga menunjukkan peningkatan insiden dan paling besar terjadi di wilayah perairan Indonesia, terutama di wilayah Selat Malaka.²¹

Selat Malaka merupakan salah satu rute laut tersibuk di dunia, lebih dari 70.000 kapal melintasi selat tersebut setiap tahunnya karena merupakan rute terpendek bagi kapal-kapal Eropa, Timur Tengah dan India yang melaluinya.²² Sesuai dengan aturan UNCLOS 1982, selain Malaysia dan Singapura, Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara yang memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan dan menjaga keselamatan serta memberi kebebasan bagi pelintas damai (*innocent passage*) yang melintasi Selat Malaka.²³

Indonesia sendiri memiliki kepentingan yang besar dalam isu keamanan maritim di kawasan, mengingat dua per tiga wilayah laut Indonesia

merupakan wilayah laut Asia Tenggara. Nilai strategis sebagai negara kepulauan dan kepemilikan Selat Malaka serta berbatasan dengan Selat Singapura yang merupakan dua jalur tersibuk di dunia telah menjadi ancaman dan tantangan yang berdimensi maritim tersendiri bagi Indonesia.²⁴

Dengan meningkatnya ancaman dan tantangan di perairan Asia Tenggara baik yang berdimensi tradisional dan non-tradisional dalam konteks maritim, penulis mengemukakan empat catatan penting yang menyatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang paling berkepentingan dalam isu keamanan maritim jika dibandingkan dengan negara-negara yang Asia Tenggara lainnya. Hal ini mengharuskan Indonesia perlu memfokuskan kepentingannya yang dapat diterjemahkan melalui instrumen diplomasi pertahanan multilateral seperti *ADMM-Plus on Maritime Security*. Adapun kepentingannya, sebagai berikut: *Pertama*, sebagai negara kepulauan yang memiliki *Sea Lanes of Communication* (SLOC). Tabel 2 menunjukkan bahwa perairan Indonesia merupakan yang paling sering menjadi target operasi kejahatan maritim di Asia Tenggara.

²⁰ Abdul Qodir Jaelan dan Udiyo Basuki, "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.3, No. 1, Juni 2013, hlm. 168-192.

²¹ IMB, "Piracy and Armed Robbery Against Ships-2015 Annual Report" (Januari-Desember 2015), (London: ICC-IMB, 2015) hlm. 5.

²² Sheldon W. Simon, "Safety and Security in the Malacca Strait: The Limits of Collaboration", NBR Special Report, 2010.

²³ Muhammad Saeri, "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka", *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No.2, Mei 2013, hlm. 806-818.

²⁴ *Ibid.*

Tabel 2. Insiden Serangan (*Actual Attacks*) dan Percobaan Serangan (*Attempted Attacks*) Menurut Lokasi Kejadian Tahun 2015

Location	ACTUAL ATTACKS		ATTEMPTED ATTACKS	
	Boarded	Hijacked	Fired Upon	Attempted
S E ASIA				
Indonesia	94	3		11
Malacca Straits	1	4		
Malaysia	6	6		1
Philippines	8		1	2
Singapore Straits	8			1
Thailand	1			

Sumber: IMB, "Piracy and Armed Robbery Against Ships-2015 Annual Report" (Januari–Desember 2015), (London: ICC-IMB, 2015), hlm. 8.

Permasalahan keamanan dan keselamatan laut di Indonesia tersebut tidak simetris dengan kemampuan Indonesia untuk mengatasinya sehingga membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Karena salah satu permasalahan utama dalam keamanan dan keselamatan laut adalah kurangnya sinergitas antar-negara yang diakibatkan kepentingan nasional tiap negara dan perbedaan doktrin maritim.²⁵

Kedua, upaya Indonesia dalam mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia, dimana ide utama dari Visi Poros Maritim Dunia adalah mengembangkan identitas maritim dan menegaskan pada "archipelagic outlook", yaitu berwawasan bahwa perairan Indonesia merupakan potensi ekonomi dan kekuatan nasional. Merujuk pada lima pilar kebijakan maritim pada Visi Poros Maritim Dunia, terdapat pilar diplomasi maritim²⁶, yaitu diplomasi

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Konsep Diplomasi maritim adalah istilah yang berlaku untuk berbagai macam kegiatan di wilayah maritim atau perairan. Dalam hal ini gugus tugas utamanya ada pada Angkatan Laut suatu negara berdaulat. Pada masa damai, diplomasi maritim ini dilakukan untuk mempengaruhi perilaku dari negara lain dalam konteks interaksi dan transaksi yang terjadi di wilayah perairan. Lihat Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman, "Maritime Diplomacy sebagai Strategi

yang mengedepankan dan berpatokan terhadap aspek-aspek yang terdapat di wilayah laut Indonesia, khususnya diplomasi dalam mempromosikan resolusi terkait sengketa perbatasan maritim.²⁷

Ketiga, kemunculan isu terorisme maritim²⁸. Semenjak peristiwa runtuhnya gedung WTC pada September 2011 dan peristiwa Bom Bali, Indonesia telah menaruh perhatian serius terhadap isu terorisme dan turut aktif dalam kebijakan *war on terror* yang dicanangkan AS. Namun hal ini menjadi dilema sendiri bagi negara yang masih menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan seperti Indonesia. Hal ini akan semakin rumit jika harus memilih mana yang didahulukan antara menangani masalah ekonomi atau

Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016.

²⁷ Iis Ginarsah dan Adhi Priamarizki, "Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns", *RSIS Policy Report*, Vol. 9, No. 9, April 2015.

²⁸ Penanganan terorisme maritim mengikuti hukum internasional dan nasional yang berlaku. Hal itu juga sesuai dengan lokasi yang mengalami serangan teroris, baik yang bersifat dinamis, seperti kapal, maupun statis, seperti kilang minyak di tengah laut. Sehingga memungkinkan untuk masuknya ranah militer, dikarenakan TNI AL memiliki fungsi polisionir. Lihat, Senia Febrica, *Maritime Security and Indonesia: Cooperation, Interests and Strategies*, (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2017).

menanganiterorisme.²⁹Belumlagipopulasi Indonesia yang mayoritas muslim, dimana gerakan terorisme cenderung merekrut masyarakat dengan pemahaman Islam radikal sehingga seringkali pemerintah harus berhadapan dengan masyarakatnya sendiri. Kemunculan kelompok terorisme yang bergerak dalam dimensi maritim, seperti kelompok Abu Sayyaf yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara³⁰ dapat menyulitkan posisi Indonesia terkait keamanan maritim dan konsistensinya dalam kebijakan *war on terror*.

Keempat, tindakan asertif Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pada dasarnya Indonesia memosisikan dirinya sebagai pihak yang netral di dalam persengketaan Laut Cina Selatan dan dapat menjadi mediator yang potensial.³¹ Namun, dengan kepentingan nasional Indonesia (klaim Tiongkok di perairan Natuna) dan kenyataan pada geopolitik saat ini, hampir tidak mungkin tetap mempertahankan poisisi tersebut. Meskipun Indonesia bukan sebagai pihak yang tidak mengklaim Laut Cina Selatan, tetapi potensi Indonesia secara diplomatik dapat menjadi kuat dalam posisi sebagai mediator yang potensial (*honest broker*)

²⁹ Wahyu Susilo, "Dibalik Penyanderaan ABK Indonesia", dalam <http://www.dw.com/id/di-balik-penyanderaan-abk-indonesia/a-19387471>, 11 Juli 2016, diakses pada 25 Januari 2018.

³⁰ Berlianto, "Operasi Militer Filipina Tewaskan 40 Anggota Abu Sayyaf", dalam <http://international.sindonews.com/read/1122837/40/operasi-militer-filipina-tewaskan-40-anggota-abu-sayyaf-1468303746>, 12 Juli 2016, diakses pada 25 Januari 2018.

³¹ Sarah Raine dan Christian Le Mière, "Chapter Three: Southeast Asia—between emerging great-power rivalry", *Adelphi Series*, Vol, 3, No.1, April 2013, hlm. 436-437.

yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dalam menghadapi tindakan-tindakan negara lain khususnya Tiongkok yang mulai asertif.

Secara sempit dalam dimensi maritim, kepentingan Indonesia dalam Laut Cina Selatan saat ini adalah konsep "*Nine Dashed Lines*" Tiongkok yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia dan kemungkinan potensi konflik di Laut Cina Selatan atau sengketa yang saat ini mengancam keamanan dan keselamatan pelayaran, serta kebebasan bernavigasi di Laut Cina Selatan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian Indonesia karena Laut Cina Selatan merupakan jalur utama bagi ekspor-impor Indonesia ke negara-negara Asia Timur.³²

Berdasarkan keempat hal tersebut, *ADMM-Plus on Maritime Security* merupakan forum yang paling tepat sebagai media diplomasi pertahanan untuk menekankan posisi dan kepentingan Indonesia tersebut. Faktanya, sampai sejauh ini *ADMM-Plus on Maritime Security* cenderung hanya bergerak di tataran dialog dan kerjasama kemanan yang normatif, padahal *ADMM-Plus* merupakan forum dialog dan kerjasama pertahanan tertinggi di ASEAN.³³

ADMM-Plus sendiri memiliki tantangan dalam beberapa hal, khususnya prinsip non-intervensi ASEAN yang membatasi beberapa kerjasama secara intens dalam kerangka kerjasama *ADMM-*

³² Jakarta International Defense Dialog (JIDD), *op.cit.*

³³ See Seng Tan, *op.cit.*

Plus yang pastinya melibatkan militer. Selain itu, ADMM Plus merupakan forum yang melibatkan *external power* dari ASEAN dan hal tersebut dapat menjadi potensi dalam melindungi kepentingan nasional terhadap negara-negara di luar kawasan (secara global). Namun, kehadiran *external power* juga dapat menjadi celah untuk intervensi negara-negara *external power* terhadap kebijakan ASEAN. Hal tersebut menuntut keseriusan negara-negara anggota ADMM-Plus terutama negara yang memiliki pengaruh besar di ASEAN, termasuk Indonesia yang memiliki kepentingan besar dalam dimensi keamanan maritim. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi Indonesia untuk menaruh perhatian serius dengan melakukan sekuritisasi keamanan sektor maritim.

Sekuritisasi Isu Keamanan Maritim dalam ADMM-Plus on Maritime Security

Untuk memahami pentingnya sekuritisasi isu keamanan maritim berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya. Maka, perlu dipahami konsep keamanan maritim yang relevan dalam kasus ini. Menurut Sam Bateman, keamanan maritim dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tradisional dan non-tradisional. Secara tradisional, keamanan maritim merupakan upaya pertahanan negara terhadap ancaman militer dan perlindungan kepentingan nasional dan kedaulatan dibidang maritim. Secara non-tradisional, keamanan maritim berada

pada lingkup pembajakan, terorisme, bencana alam, penyelundupan, *Illegal fishing*, dan ancaman lingkungan.³⁴

Sementara itu, Marry Ann Palma menyatakan keamanan maritim merupakan “suatu kondisi”, yaitu kondisi ketika suatu negara terbebas dari berbagai ancaman terhadap kepentingannya dalam aspek kemaritiman. Ancaman tersebut dapat berupa militer maupun non-militer. Pada dasarnya ancaman yang memakai dimensi laut sebagai sarannya bersifat lintas batas. Oleh karena itu, keamanan maritim merupakan tanggung jawab setiap negara. Dalam pengelolaannya, semakin besar wilayah maritim suatu negara, maka semakin besar pula tanggung jawab negara tersebut untuk mengamankan wilayahnya.³⁵

Konsep keamanan maritim terus mengalami perkembangan, diikuti dengan peristiwa 9/11 yang menghubungkan konsep keamanan (*security*) dengan keselamatan (*safety*). Seiring perkembangan zaman, semakin banyak institusi dan aturan serta perwakilan yang terlibat dalam keamanan maritim (seperti ADMM-Plus on Maritime Security yang berbentuk diplomasi pertahanan). Selain itu, perlu diperhatikan pula perubahan pola interaksi antar-aktor yang terlibat dalam keamanan maritim, dimana koordinasi tidak hanya terjadi pada tingkatan nasional tetapi juga regional

³⁴ Rupert Herbert-Burns, Sam Bateman, dan Peter Lehrs, *Lloyd's MIU handbook of maritime security*, (New York: CRC Press, 2008).

³⁵ Mary Ann Palma *The Philippines as an Archipelagic and Maritime Nation: Interests, Challenges, and Perspectives*, (Sydney: University of Wollongong, 2009).

dan internasional.³⁶

Berdasarkan perkembangan konsep tersebut, Palma membagi permasalahan keamanan maritim dalam dua kategori, yaitu: *pertama*, keamanan maritim sebagai keamanan nasional dengan tujuan untuk melindungi integritas wilayah dari sumber ancaman internal. *Kedua*, keamanan maritim yang berdampak regional, karena setiap negara pasti memiliki kebijakan terkait ancaman eksternal (kejahatan transnasional) yang akan berdampak pada dinamika regional.³⁷

Dalam tulisan ini, konsep keamanan maritim terletak pada konsepsi dasar pada perwujudan keamanan laut, yaitu melalui penegakan hukum dan penegakan kedaulatan, di mana keduanya saling berkaitan.³⁸ *ADMM-Plus on Maritime Security* merupakan kerjasama terkait keamanan maritim. Keamanan dalam konteks ini, mengambil definisi keamanan laut milik Benard Kent Sondakh yang mengandung pemahaman bahwa laut aman digunakan dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas penggunaan atau pemanfaatan laut.³⁹

³⁶ Bhubhindar Singh, "Introduction: Defence Diplomacy and Southeast Asia. From 'Boots' to 'Brogues': The Rise of Defense Diplomacy in Southeast Asia, RSIS Monograph", (Singapore: Rajaratnam School of International Studies, 2011).

³⁷ Mary Ann Palma, Martin Tsamenyi, dan William R. Edeson, "Promoting sustainable fisheries: The international legal and policy framework to combat illegal, unreported and unregulated fishing", (Boston: Martinus Nijhoff, 2010).

³⁸ Yanti dan Bayu Vita Indah, "Peningkatan Kapasitas Nelayan Terkait Upaya Pertahanan Negara di Wilayah Perbatasan", *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 4, No.1, Juni 2014, hlm. 15-24.

³⁹ Bernard Ken Sondakh, "National Sovereignty and Security in the Strait of Malacca", Kuala

Namun, dengan adanya permasalahan laut dan menjadi ancaman terhadap Indonesia, maka perlu adanya sekuritisasi terhadap keamanan maritim untuk menciptakan kerangka kebijakan yang jelas ketika dihadapkan pada forum multilateral seperti *ADMM-Plus on Maritime Security*.

Teori sekuritisasi, pertama kali diciptakan oleh Ole Weaver dan selanjutnya dikembangkan oleh Buzan, sehingga penjelasan mengenai sekuritisasi didominasi oleh pemikiran Copenhagen School.⁴⁰ *Copenhagen School* menjelaskan sekuritisasi sebagai proses konstruksi secara intersubjektif dan sosial dimana ancaman terhadap *referent object*⁴¹ dianggap layak untuk dilindungi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa masalah keamanan merupakan produk konstruksi. Suatu isu dapat dikatakan sebagai masalah keamanan karena adanya

Lumpur: MIMA International Conference on the Straits of Malacca, 2004.

⁴⁰ Posisi dari *Copenhagen School* berada (via media) antara keamanan tradisional yang cenderung *state-centrism* dan keamanan kritis yang memiliki fokus pada individu atau *global security*. Aliran keamanan yang dianut oleh *Copenhagen School* lebih kepada *societal security* atau keamanan masyarakat. Berbeda dengan *referent object* yang dimiliki oleh keamanan tradisional yaitu negara dan *global security* yaitu individu. Keamanan masyarakat dari *Copenhagen School* merujuk pada dua hal yaitu negara serta masyarakat. Dalam Barry Buzan & Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, (New York: Cambridge University Press, 2009), hlm. 213.

⁴¹ *Referent object* disini adalah suatu objek (negara atau masyarakat) yang dipandang secara eksistensial terancam dan harus diamankan. Pertanyaan selanjutnya apakah hanya negara yang merupakan aktor tunggal dalam melakukan sekuritisasi? Menurut Buzan 'tidak', pada prinsipnya sekuritisasi dapat dilakukan oleh siapapun. Dalam Barry Buzan & Eric Herring, *The Arms Dynamic in World Politics*, (Boulder: Lynne Rienner, 1998).

discourse content ditambah lagi adanya aktor politik yang mentransformasikannya dari suatu isu yang tidak dianggap penting menjadi isu yang mendesak. Konsep sekuritisasi berkaitan dengan *power of idea* atau dapat dikatakan upaya dalam mengkonstruksikan pikiran.

Tujuan utama dari sekuritisasi yang dilakukan oleh negara adalah untuk mengubah statusnya dalam hierarki kebijakan pemerintah.⁴² Maka, sekuritisasi dalam isu keamanan maritim akan merubah hierarki kebijakan pemerintah menjadi prioritas. Prioritas dalam konteks ini bukan hanya sekedar dalam ungkapan, nawacita, atau pernyataan pejabat politis, namun pada tingkatan yang lebih terstruktur, jelas, dan memiliki produk tertulis sehingga dapat dibentuk strategi kebijakan dan operasionalnya. Secara sederhana, sekuritisasi dapat dipahami sebagai upaya memahami siapa yang melakukan sekuritisasi, atas isu (ancaman) apa, kepada siapa, mengapa, dengan hasil seperti apa, dan dengan syarat apa. Terdapat 6 tahapan penting dalam sekuritisasi, yaitu: *securitizing actor*, *speech act*, *existential threat*, *referent object*, *audience*, dan *functional actor*.⁴³

Berikut aplikasi konsep sekuritisasi isu keamanan maritim di Indonesia apabila ditujukan untuk mendukung diplomasi pertahanan Indonesia di *ADMM-Plus on Maritime Security*:

- **Securitizing Actor**

Aktor yang melakukan sekuritisasi

⁴² Buzan & Hansen, *op.cit.*

⁴³ *Ibid.*

adalah Pemerintah Indonesia.

- **Speech Act**

Adanya pernyataan dari *Securitizing Actor*, Indonesia melalui Presiden RI, Joko Widodo menyatakan keseriusan dalam menangani permasalahan keamanan maritim melalui pidatonya untuk mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia, baik didalam konferensi dalam negeri maupun di organisasi dan forum internasional, seperti *International Maritim Organization* (IMO) dan ASEAN.⁴⁴ TNI AL⁴⁵ dan Kementerian Pertahanan RI juga menyatakan dalam beberapa konferensi bahwa isu keamanan maritim merupakan *concern* yang memiliki tingkat prioritas tinggi.⁴⁶

- **Existential Threat (s)**

Ancaman nyata yang berdimensi maritim dan perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks ini adalah:

- Kejahatan transnasional yang berdimensi maritim relatif meningkat di laut Indonesia.
- Sikap asertif Tiongkok di Laut

⁴⁴ "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia", dalam <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html> 13 November 2015, diakses pada 3 Februari 2018.

⁴⁵ "TNI AL-Pegang Peranan Penting Jaga Keamanan Maritim", dalam <http://cakrawala-dispenal.org/index.php/berita/365-tni-al-pegang-peranan-penting-jaga-keamanan-maritim.html>, 12 Juli 2015, diakses pada 3 Februari 2018.

⁴⁶ Defence Media Center, *JIDD Ke-4 Bicarakan Upaya Membangun Kerjasama Keamanan Maritim*, dalam <http://dmc.kemhan.go.id/post-jidd-ke4-bicarakan-upaya-membangun-kerjasama-keamanan-maritim.html>, 17 Maret 2014, diakses pada 3 Februari 2018.

Cina Selatan dan klaim Tiongkok yang bersinggungan dengan Natuna.

- Terorisme maritim.
 - Visi Poros Maritim Dunia (diplomasi maritim).
 - Meningkatkan pengaruh Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dan *external powers*.
- **Referent Object**
Seluruh objek yang dipandang secara eksistensial terancam dan harus diamankan. Dalam konteks ini *referent object* adalah seluruh masyarakat Indonesia.
 - **Audience**
Seluruh negara di kawasan Asia Tenggara serta negara-negara luar kawasan yang berkepentingan.
 - **Functional Actor**
Para pelaku kejahatan maritim.

Sekuritisasi isu-isu keamanan maritim semakin sering dilakukan pemerintah Indonesia semenjak dicanangkannya Visi Poros Maritim Dunia dalam kampanye Presiden RI, Joko Widodo. Namun sekuritisasi tersebut tidak mendetail dan spesifik terhadap isu-isu yang menjadi urgensi terhadap keamanan dan pertahanan, seperti masih kurangnya keseriusan Indonesia dalam menciptakan keamanan maritim di tempat-tempat vital dan sedang mengalami ancaman, seperti Selat Malaka dan perairan Natuna yang

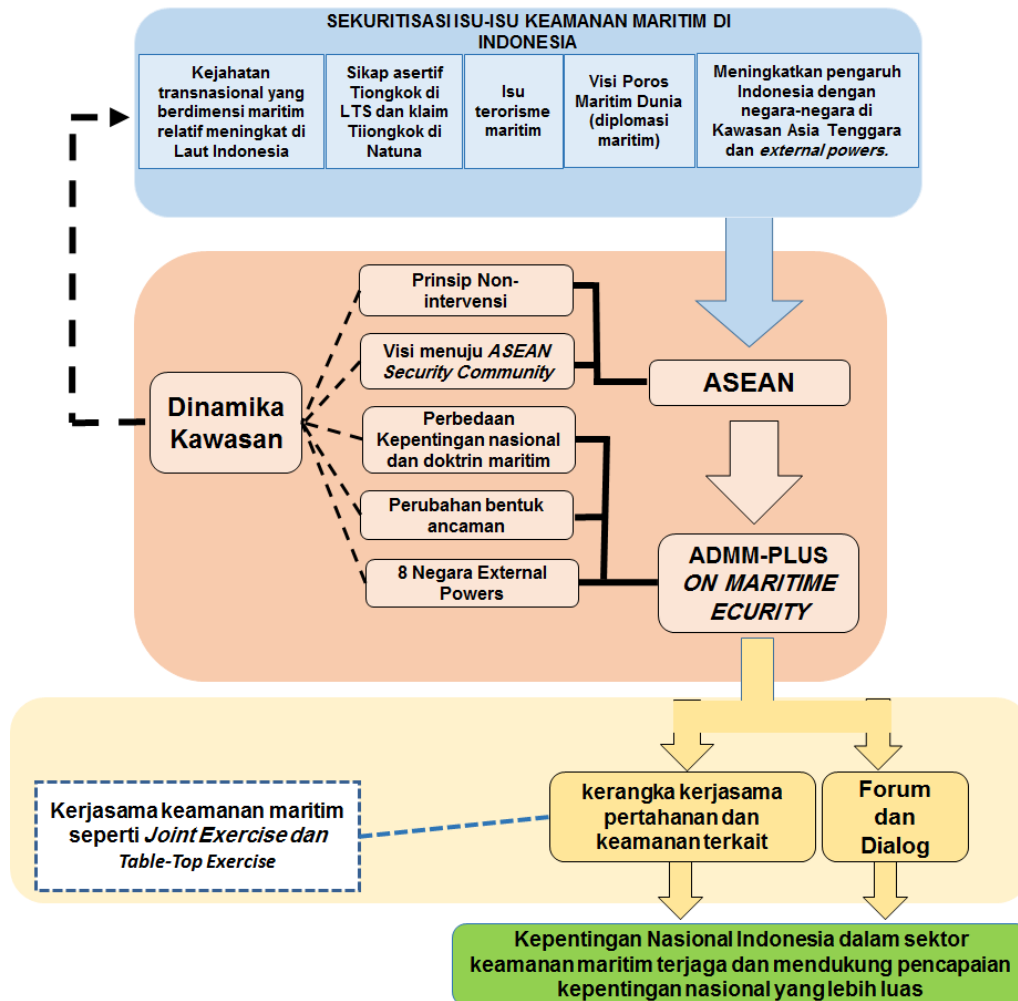
sedang diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari Laut Cina Selatan.⁴⁷

Hal tersebut membuktikan jika Indonesia mampu menjaga keamanan maritimnya maka Indonesia akan mampu menciptakan strategi diplomasi pertahanan Indonesia yang efektif untuk mencapai kepentingan nasional khususnya dibidang keamanan dan pertahanan yang berdimensi maritim. Namun, hingga saat ini kepentingan nasional Indonesia (termasuk dalam dimensi maritim) masih sulit untuk didefinisikan baik dalam tataran istilahnya maupun substansi. Hal ini dikarenakan belum adanya produk tertulis yang menyatakan secara jelas kepentingan nasional Indonesia dalam sektor maritim. Konsekuensinya, akan sulit untuk menyusun strategi jangka panjang dan tujuan nasional terkait keamanan maritim.⁴⁸ Sehingga, tahap awal yang perlu dilakukan adalah memaknai isu keamanan maritim dengan melakukan sekuritisasi isu tersebut. Seperti yang telah dijelaskan bahwa *ADMM-Plus on Maritime Security* merupakan media diplomasi pertahanan yang relevan untuk melindungi kepentingan Indonesia terkait keamanan maritim. Berikut alur sekuritisasi isu keamanan maritim yang dapat dibawa melalui *ADMM-Plus on Maritime Security*.

⁴⁷ Budiman Djoko Said dalam Lubis, *op.cit*.

⁴⁸ Willy F. Sumakul, "Kepentingan Nasional (Indonesia) dan Pembangunan Kekuatan Pertahanan", *Quarterdeck*, Vol. 9, No. 7, November 2015, hlm. 10-16.

Skema 1. Skema Alur Sekuritisasi isu Keamanan Maritim dalam ADMM-Plus on Maritime Security



Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan Skema Alur Sekuritisasi isu Keamanan Maritim dalam ADMM-Plus on Maritime Security di atas, jika Indonesia telah sepakat dan serius menjadikan keamanan maritim sebagai isu penting melalui sekuritisasi isu-isu keamanan maritim yang mendesak tersebut, maka segala aspek negara akan mengarah dan mendukung sektor maritim. Hal ini akan mendukung diplomasi pertahanan Indonesia terkait keamanan maritim di kawasan melalui forum dan kerangka kerjasama seperti ADMM-Plus on Maritime Security yang dapat menjadi strategi

diplomasi pertahanan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional yang lebih luas.

Namun, hingga saat ini Indonesia belum memaknai isu keamanan maritim tersebut sebagai isu yang perlu diangkat dan terus dibawa dalam forum seperti ADMM-Plus on Maritime Security. Terdapat kecenderungan isu keamanan maritim di Indonesia hanya populer dalam momen-momen tertentu, khususnya pada momentum politis. Hal ini terlihat dari belum adanya produk tertulis dan tujuan yang jelas mengenai sikap Indonesia

terkait permasalahan keamanan maritim yang bersifat lintas negara. Selain itu, banyaknya tumpang-tindih regulasi.⁴⁹

Ketidakmapanan Indonesia dalam memaknai isu keamanan maritim yang sedang dihadapi merupakan salah satu contoh kritik bagi konsep sekuritisasi atas ketidakmampuannya melakukan identifikasi. Lene Hansen memberikan istilah tersebut dengan “*the silent security dilemma*” atau “*security as silence*”. Istilah “*security as silent*” diartikan ketika subjek yang *insecure* tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan isu keamanannya.⁵⁰

Selain itu, konsekuensi dari “*security as silence*” menjadi masalah ketika penyelesaian suatu isu keamanan tidak lagi melalui logika politik (kompromi, debat, dan solusi). Dimana ketika segelintir elit memiliki hak istimewa (sebagai aktor keamanan) yang memiliki legitimasi menangguk hak dan kebebasan sipil dengan alasan keamanan.⁵¹ Kritik terhadap sekuritisasi juga dikatakan oleh Bigo dan Huysmans. Mereka berpendapat konseptualisasi dari sekuritisasi merupakan drama diskursus yang melewati (tidak melalui) rutinitas birokrasi, misal praktik yang dilakukan oleh polisi atau kelompok keamanan

profesional lain. Tindakan *extraordinary* yang dilakukan elit penguasa melalui sekuritisasi, membuat elit tersebut melakukan tindakan apapun untuk mencapai keamanan. Selain itu, elit penguasa memiliki legitimasi untuk mendapatkan kontrol atas proses politik dengan menekan *power* dari parlemen dan kelompok oposisi.⁵² Sehingga apa yang terjadi di Indonesia dapat dipahami bahwa suatu isu keamanan (termasuk keamanan maritim) kerap berdiri sebagai instrumen politik.

Kesimpulan

Selama ini sudah banyak ancaman-ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan maritim di Indonesia, khususnya ancaman non-tradisional. Banyak terjadi perbedaan perspektif dan kepentingan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan negara pengguna atau negara yang memiliki kepentingan terhadap wilayah maritim Indonesia. Hal tersebut yang menjadi hambatan dalam menghadapi ancaman-ancaman yang mengganggu pengelolaan keamanan maritim baik di perairan Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. *ADMM-Plus on Maritime Security* merupakan media diplomasi pertahanan yang paling tepat bagi Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya, terutama dalam sektor keamanan maritim. Karena *ADMM-Plus on Maritime Security* menyediakan

⁵² Jeff Huysmans, “*Defining social constructivism in security studies: The normative dilemma of writing security*”, *Alternatives-Amsterdam Then New York Then Guildford-*, Vol. 27, No. 1. Februari 2002, hlm. 41-62.

⁴⁹ Abraham Utama, “Tumpang Tindih Aturan Penegakan Hukum”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004163018-20-82691/tumpang-tindih-aturan-penegakan-hukum-maritim>, 5 Oktober 2015, diakses pada 5 Februari 2018.

⁵⁰ Lene Hansen, “The Little Mermaid’s Silent Security Dilemma and The Absence of Gender in The Copenhagen School”, *Millennium-Journal of International Studies*, Vol. 29, No. 2, Juni 2002, hlm. 285-306.

⁵¹ *Ibid.*

wadah bagi negara-negara ASEAN dan *External Powers* untuk menyampaikan kepentingannya melalui forum, diskusi, dan kerjasama keamanan dalam sektor maritim.

Melihat dinamika kawasan saat ini, Indonesia dituntut untuk mampu memanfaatkan permasalahan di perairannya sebagai sarana dalam mengedepankan kepentingannya, khususnya dibidang pertahanan dan keamanan. Akan tetapi Indonesia masih belum serius dalam menentukan dan menjadikan keamanan maritim sebagai hal yang penting untuk difokuskan. Hal ini terlihat dari belum adanya produk tertulis dan tujuan yang jelas mengenai sikap Indonesia terkait permasalahan keamanan maritim yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan sekuritisasi isu-isu keamanan maritim untuk menghadapi tuntutan yang mendesak dari dinamika keamanan maritim di Indonesia dan kawasan. Namun sekuritisasi dalam kasus ini cenderung tidak memberikan solusi karena implementasinya tidak efektif. Hal ini juga diakibatkan kelemahan dari konsep sekuritisasi tersebut. Pada dasarnya sekuritisasi merupakan bentuk ekstrim dari politisasi yang membuat tindakan-tindakan tertentu dilegalkan dengan tujuan keamanan. Maka suatu isu akan dianggap penting atau mengalami sekuritisasi jika hal tersebut sesuai dengan logika politik dari aktor yang melakukan sekuritisasi (elit pemerintah) dan hal tersebut terjadi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- ASEAN Secretariat. 2008. *The ASEAN Charter*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Buzan, Barry dan Lene Hansen. 2009. *The Evolution of International Security Studies*. New York: Cambridge University Press.
- Buzan, Barry dan Eric Herring. 1988. *The Arms Dynamic in World Politics*. Boulder: Lynne Rienner.
- Herbert-Burns, R., dkk. 2008. *Lloyd's MIU Handbook of Maritime Security*. New York: CRC Press.
- Jakarta International Defense Dialog (JIDD). 2014. "Strategic Assessment Building Maritime Collaboration for Security and Stability". Jakarta: JIDD.
- Palma, M. Ann, dkk. 2010. *Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Boston: Martinus Nijhoff.
- Sondankh, B. Ken. 2004. *National Sovereignty and Security in the Strait of Malacca*. Kuala Lumpur: MIMA International Conference on the Straits of Malacca.
- Singh, Bhubhindar. 2011. *Introduction: Defence Diplomacy and Southeast Asia. From 'Boots' to 'Brogues': The Rise of Defense Diplomacy in Southeast Asia, RSIS Monograph*. Singapore: Rajaratnam School of International Studies.
- Febriana, Senia. 2017. *Maritime Security and Indonesia: Cooperation, Interests and Strategies*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Jurnal

- Carpie, David. 2013. "Structures, Shocks and Norm Change: Explaining The Late Rise of Asia's Defence Diplomacy". *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*. Vol.31. No.1. April.

- Gindarsah, Iis dan Adhi Priamarizki. 2015, "Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns". *RSIS Policy Report*. Vol. 9. No. 9. April.
- Hansen, Stig J. 2014. "Private security & Local Politics in Somalia". *Review of African Political Economy*. Vol. 35 No. 118. Desember.
- Hansen, Lenne. 2002. "The Little Mermaid's Silent Security Dilemma and The Absence of Gender in The Copenhagen School". *Millennium-Journal of International Studies*. Vol. 29, No. 2. Juni.
- Huysmans, Jeff. 2002. "Defining Social Constructivism in Security Studies: The Normative Dilemma of Writing Security". *Alternatives-Amsterdam Then New York Then Guildford*. Vol. 27. No. 1. Februari.
- Jaelan, Abdul Q, dan Udiyo Basuki. 2013. "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia". *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 3. No. 1. Juni.
- Matthew, Davies. 2013. "Explaining The Vientiane Action Programme: Asean And The Institutionalisation of Human Rights". *The Pacific Review*. Vol. 26. No. 4. September.
- Nugraha, M. H. R. dan Arfin Sudirman. 2016. "Maritime Diplomacy sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia". *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 1. No. 2. Oktober.
- Raine, Sarah dan Christian Le Mière. 2013. "Chapter Three: Southeast Asia-between Emerging Great-Power Rivalry". *Adelphi Series*. Vol. 3. No. 1. April.
- Sumakul, W. F. 2015. "Kepentingan Nasional (Indonesia) dan Pembangunan Kekuatan Pertahanan". *Quarterdeck*. Vol. 9. No. 7. November.
- Saeri, M. 2013. "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka". *Jurnal Transnasional*. Vol. 4. No. 2. Mei.
- Tan, S. Seng. 2011. "Providers not protectors: institutionalizing responsible sovereignty in Southeast Asia". *Asian Security Journal*. Vol. 7. No. 13. September.
- Yanti dan Bayu Vita Indah. 2014. "Peningkatan Kapasitas Nelayan Terkait Upaya Pertahanan Negara di Wilayah Perbatasan". *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Vol. 4. No. 1. Juni.

Website

ASEAN, "ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime", dalam http://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Plan-of-Action-in-Combating-TC_Adopted-by-11th-AMMTC-on-20Sept17.pdf, 20 September 2017, diakses pada 5 Februari 2018.

"About the ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)", dalam <https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm-plus.html>, 14 Januari 2014, diakses pada 20 Januari 2018.

Berlianto, "Operasi Militer Filipina Tewaskan 40 Anggota Abu Sayyaf", dalam <http://international.sindonews.com/read/1122837/40/operasi-militer-filipina-tewaskan-40-anggota-abu-sayyaf-1468303746>, 12 Juli 2016, diakses pada 25 Januari 2018.

Center of International Maritim Security, "The ISPS-Code and Maritime Terrorism", dalam <http://cimsec.org/isps-code-maritime-terrorism/12098>, 15 Juli 2014, diakses pada 5 Februari 2018.

Defence Media Center, "JIDD Ke-4 Bicarakan Upaya Membangun Kerjasama Keamanan Maritim", dalam <http://dmc.kemhan.go.id/post-jidd-ke4-bicarakan-upaya-membangun-kerjasama-keamanan-maritim.html>, 17 Maret 2014, diakses pada 3 Februari 2018.

"Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia", dalam <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>, 13 November 2015, diakses pada 3 Februari 2018.

Susilo, Wahyu, “Di Balik Penyanderaan ABK Indonesia”, dalam <http://www.dw.com/id/di-balik-penyanderaan-abk-indonesia/a-19387471>, 11 Juli 2016, diakses pada 25 Januari 2018.

“TNI AL-Pegang Peranan Penting Jaga Keamanan Maritim”, dalam <http://cakrawala-dispenal.org/index.php/berita/365-tni-al-pegang-peranan-penting-jaga-keamanan-maritim.html>, 12 Juli 2015, diakses pada 3 Februari 2018.

Utama, Abraham, “Tumpang Tindih Aturan Penegakan Hukum”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004163018-20-82691/tumpang-tindih-aturan-penegakan-hukum-maritim>, 5 Oktober 2015, diakses pada 5 Februari 2018.

Tesis dan Disertasi

Lubis, Rizky Reza. 2017. “Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mereduksi Rivalitas Great Powers di Laut Cina Selatan”. (Tesis). Sentul: Universitas Pertahanan Indonesia.

Pedrason, Rodon. 2015. “*Asean’s Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community*”. (Disertasi). Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

Palma, Mary A. 2009. “The Philippines as an Archipelagic and Maritime Nation: Interests, Challenges, and Perspectives”. (Disertasi). Sydney: *University of Wollongong*.

Laporan

IMB. 2015. “Piracy and Armed Robbery Against Ships-2015 Annual Report (Januari–Desember 2015)”. London: ICC-IMB.

Simon, Sheldon W. 2010. “Safety and Security in the Malacca Strait: The Limits of Collaboration”. NBR Special Report 201.

